KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

	RIAN KEUANGAN RI T JENDERAL PAJAK	H.1 NOMOR :					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 6 9 7 5 2 8 8 5 9 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : SOPIA LENA								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		ASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3		B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	5.000.000		5.000.000	0	15	750.000	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota  B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy  B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.  Nomor : Tanggal dd mm yyyyy  B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :  C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK  C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0								
	: ndatangan :	RUMAH SAKIT JI'  2 6 dd 0  RIANDY  Dengan ini saya men tandatangani secara d	WA DAERAH  4 mm 2  yatakan bahwa elektronik.	H ATMA HUSADA MAHAK.  0 2 2 yyyy  a bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
	<b>病毒激</b>							

7MLTLQSB